

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	2	0
---	---	---	---



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Media Online	
Media Cetak	Kompas

# Transisi Bawa Konsekuensi

Pelonggaran mobilitas diikuti keramaian di fasilitas publik. Di sisi lain, kedisiplinan soal protokol kesehatan belum maksimal. Oleh sebab itu risiko penularan Covid masih tinggi.

JAKARTA, KOMPAS — Pada hari pertama penerapan PSBB Transisi di DKI Jakarta, Senin (8/6/2020), aktivitas publik melonjak meskipun belum sepadat masa sebelum pandemi Covid-19. Di tengah adaptasi menuju normal baru itu, kewaspadaan warga dan pemerintah justru harus ditingkatkan.

Di jalanan, arus lalu lintas mulai padat. Selain mobil, sepeda motor juga mulai memadati ruas jalan seiring aktifnya perkantoran. Transportasi publik seperti KRL juga dipadati penumpang, yang mengantre sambil menjaga jarak sejak di stasiun pemberangkatan.

Di stasiun tujuan, ojek daring mulai menerima penumpang, meskipun partisipasi pembatas pengemudi dan penumpang belum dipasang. Di perkantoran, ruang-ruang yang dua bulan terakhir hampir kosong, mulai diisi sejumlah karyawan dengan sistem sif.

Senin pagi (8/6), Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meninjau pelaksanaan PSBB transisi di titik integrasi transportasi umum di Terowongan Kendal, Dukuh Atas Jakarta Pusat. Keberhasilan PSBB transisi menuju normal baru akan ditentukan dari kedisiplinan warga hingga pengaturan pola jam kerja di kantor.

Bersama Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo dan Kepala Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Arifin, Anies meninjau Stasiun MRT Dukuh Atas, Stasiun KRL Sudirman, dan Halte Transjakarta Dukuh Atas. Arus mobilitas warga dan kepatuhan protokol

kesehatan jadi perhatian.

"Kita masih pada masa PSBB. Wabah di Jakarta belum selesai tetapi kita tahu bahwa ini adalah masa transisi. Beberapa sektor sudah mulai bisa beraktivitas, salah satunya kegiatan perkantoran. Saya ingin mengingatkan, seluruh protokol kesehatan harus ditaati. Penggunaan masker harus dilakukan sepanjang waktu di mana saja dan kapan saja," kata Anies.

Data PT Kereta Commuter Indonesia (KCI), volume pengguna KRL hingga Senin pukul 10.00, mencapai 150.000 orang. Angka itu terpantau dari jumlah pengguna yang melakukan *tap* masuk gerbang pembayaran.

Erni Sylvianne Purba, VP Corporate Communications PT KCI, menjelaskan, jika dibandingkan masa PSBB (bukan PSBB transisi), pada jam pelayanan serupa, mulai dari jam operasional hingga pukul 10.00, secara rata-rata KCI melayani 80.000 penumpang.

Di Stasiun Bogor, para pengguna KRL mulai memadati stasiun sejak pukul 05.00 hingga 09.00. Kapadatan terjadi karena ada pembatasan jumlah penumpang dan pemberlakuan jaga jarak fisik yang diterapkan PT KCI.

Butuh waktu 15-60 menit bagi pengguna KRL sebelum melewati mesin *tapping* hingga peron kereta. Petugas juga kerap mengimbau melalui pengeras suara untuk jaga jarak aman.

Andri Aisyahbana (25), pengguna KRL asal Tanah Sereal, Bogor, kembali menggunakan KRL setelah dua bulan lebih tidak memakai jasa transportasi

tersebut. Ia terpaksa menggunakan KRL lagi karena kantornya di Jakarta Pusat mewajibkan karyawan masuk.

"Saya menunggu hampir 30 menit untuk masuk ke peron karena ada kebijakan jaga jarak. Saya cukup khawatir pada penyebaran Covid-19, tetapi tidak ada transportasi lain yang lebih efektif dan efisien selain KRL menuju kantor," ujarnya.

Pemantauan di pintu keluar Stasiun Sudirman, para penumpang sudah mematuhi protokol kesehatan dengan menggunakan masker. Jarak aman juga diterapkan. "Kita lihat para penumpang yang keluar dari kendaraan umum, 100 persen menggunakan masker. Bagi yang melanggar aturan akan didenda Rp 250.000," kata Anies.

Meski jumlah penumpang belum normal, kata Anies, tetap harus mengantisipasi kepadatan di halte, stasiun, dan titik-titik wilayah lainnya.

Pengamat kebijakan publik Universitas Indonesia Agus Pambagio mengatakan, pemerintah daerah yang menerapkan PSBB transisi atau PSBB proporsional harus siap dengan segala konsekuensi. Masih banyak pelanggaran protokol kesehatan, "Jika ada pelanggaran, harus ada pengawasan ketat. Jika tidak dan terjadi ledakan kasus Covid-19 lagi, pusat dan daerah harus siap dengan tenaga maupun fasilitas kesehatan," ujarnya.

"Jika ada pelanggaran, harus ada pengawasan ketat. Jika tidak dan terjadi ledakan kasus Covid-19 lagi, pusat dan daerah harus siap dengan tenaga maupun fasilitas kesehatan," ujarnya.

## Jam kantor

Menekan risiko peningkatan kasus penularan Covid-19, Anies berharap kerja sama semua

pihak, baik warga dan lembaga, serta institusi dalam pemberlakuan jam kerja karyawan.

Pemprov DKI akan melihat data secara komprehensif, seperti jumlah kendaraan yang memasuki DKI Jakarta, jumlah penumpang kendaraan umum, hingga pantauan jam kantor. "Itu semua kami pantau. Pengaturannya memang diberikan pada tiap-tiap kantor. Yang penting jam kantor harus dibagi dua atau lebih sif supaya warga tidak menumpuk," ujarnya.

Desakan pengaturan jam kerja juga disampaikan Wali Kota Bogor Bima Arya. Dia berharap perusahaan-perusahaan di Jakarta mengatur lebih ketat jam kerja, agar tak terjadi penumpukan orang di stasiun-stasiun kereta.

"Perusahaan pasti punya data pekerja yang berdomisili di Bogor dan sekitarnya. Sebaiknya ada dispensasi agar pegawai dari Bogor tidak berangkat bersamaan. Jadi bisa dibuat sif," kata Bima di Stasiun Bogor.

Di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), pengaturan kehadiran pegawai lebih ketat daripada Pergub Jakarta 51/2020. Jika Pemprov Jakarta mewajibkan pegawai yang masuk kerja maksimal 50 persen dari kapasitas ruangan, LIPI justru maksimalnya 20 persen.

Sekretaris Utama LIPI Nur Tri Aries Suestiningtyas menjelaskan, ukuran ruang kerja di unit-unit LIPI beragam. "Kami memakai sistem kerja tiga lokasi, yaitu di rumah, di kantor, dan di unit-unit LIPI yang terdekat dari tempat tinggal peneliti atau pegawai," katanya.

Pegawai lanjut usia atau sedang tidak fit dilarang masuk. Lembaga riset ini melarang pegawai menaiki segala jenis angkutan umum. LIPI menyediakan antar-jemput yang kapasitasnya 50 persen dari situasi normal. Pegawai yang tidak kebagian jatah fasilitas kantor wajib memakai kendaraan pribadi. Jika tidak, dianjurkan bekerja dari rumah.

Di Universitas Tarumanagara, semua anggota staf akademik ataupun non-akademik masih mempraktikkan bekerja dari rumah. Rektor Untar Agustinus Purna Irawan mengatakan, masih menunggu peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengenai pembukaan kampus.

Meski ada pelonggaran, sejumlah perusahaan masih menerapkan pola bekerja dari rumah. "Masih bekerja dari rumah untuk sebagian karyawan. Yang masuk dibagi dua sif dan harus menaati protokol kesehatan," kata Stmindo R Pakpahan (54), karyawan swasta pengguna KRL yang ber Kantor di Sudirman.

Seperti halnya Stmindo, Cita (24), warga Kota Tangerang yang ber Kantor di sekitar Dukuh Atas, mengatakan, tidak ada kepadatan di dalam KRL. Protokol kesehatan dijalankan.

Penumpang MRT juga masih sedikit. Selama perjalanan rute Lebak Bulus-Bundaran Hotel Indonesia pukul 08.00, penumpang di dalam satu gerbong tak lebih dari 10 orang. Setiap orang duduk berjarak dua meter dan mengenakan masker.

(GIO/ILN/DNE/MTK/PRD/JOG)